



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADHLULLAH, SE
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 211889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **25.837.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.084.000.000
2. Tanah Seluas 6.840 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 2.052.000.000
3. Tanah Seluas 1.600 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.036 m2/600 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 5.600.000.000
7. Tanah Seluas 18.071 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 5.421.300.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 12.000 m2/2.000 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
9. Tanah Seluas 2.709 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
10. Tanah Seluas 4.670 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **648.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI



Rp. 190.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER GR Tahun 2022, HASIL SENDIRI

Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.903.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.000.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 30.388.300.000

III. HUTANG

Rp. 2.850.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 27.538.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.